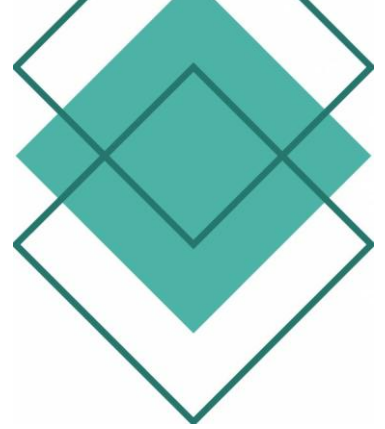




RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**



KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kelima dari dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026. Sasaran prioritas pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 mengacu dan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2026.

Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 harus mempedomani Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelarasan arah dan tujuan pembangunan daerah. Sinkronisasi dan penyelarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah merupakan bagian integral dari pembangunan di daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Jember pada tahun anggaran 2026. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2026 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2026.

Jember, Maret 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Bambang Saputro, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197407131993111003

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..	
2.4 <i>Review Terhadap Rancangan Awal RKPD</i>	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan	38
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 52
 BAB V. PENUTUP	 67

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Jember	68
Tabel Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.....		68
Tabel T-C. 30.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember	68
Tabel T-C. 31.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember	68
Tabel T-C. 32.	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember	68
Tabel T-C. 33.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	68
Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		68

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rancangan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Evaluasi

Kinerja terhadap Pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Setelah melalui penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja hingga Penetapan Renja Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 4 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Sebagai perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan operasional, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2025 ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2025 ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025;
- b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2025;
- c. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program atau kegiatan atau sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan atau sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember pada Tahun 2024 mendapatkan total anggaran sebesar Rp 34.874.293.342,- yang dibagi menjadi 2 rekening belanja yaitu Belanja Operasi sebesar Rp 34.368.286.342,- dan Belanja Modal sebesar Rp 506.007.000,- Untuk Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.552.816.592,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 18.815.469.750,-. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 506.007.000,- Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2024 mengacu pada capaian indikator sasaran program yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember 2021-2026 terdapat 4 program 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja pada Tahun 2024. Adapun Capaian target Renja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program/Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja rata-rata mencapai target

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; -

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2024 tidak ada yang melebihi target kinerja.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Secara umum capaian realisasi anggaran ini telah tercapai dengan baik, secara keseluruhan anggaran terealisasi sesuai target. walaupun mengalami kenaikan dan penurunan realisasi daya serap keuangan. Strategi yang ditetapkan untuk mencapaisasaran yaitu kebijakan, program dan kegiatan sudah efektif.

Faktor Penyebab terpenuhinya target kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja, sehingga dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dari Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yaitu pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra, sehingga peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan Rencana Kerja 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan yang mengarah pada Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat serta mengedepankan skala prioritas terutama untuk program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sehingga target kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai serta fokus pada target capaian yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 serta pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Jember

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran	100%	88,28%	100%	84,05%	84,05%	100%	100%	100%
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55 Dokumen	33 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	55 Dokumen	100%
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	100%

1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	100%
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	15 Laporan	100%
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	15 Laporan	100%
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	80 Laporan	48 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	80 Laporan	100%
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	124 Orang/Bulan	124 Orang/Bulan	124 Orang/Bulan	124 Orang/Bulan	100%	124 Orang/Bulan	124 Orang/Bulan	100%
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	25 Laporan	100%
1	5	1	1.03								100%			100%

					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	25 Laporan	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan	25 Laporan	
1	5	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	20 Laporan	100%
1	5	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	15 Dokumen	100%
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	100%
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	12 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	20 Paket	100%
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	60 Paket	100%
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	12 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	20 Paket	100%
1	5	1	2.06	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%

						Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
1	5	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185 Laporan	111 Laporan	37 Laporan	37 Laporan	100%	37 Laporan	185 Laporan	100%
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67%	12 Laporan	60 Laporan	100%
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Laporan	39 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	92%	13 Laporan	65 Laporan	100%
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	100%	32 Laporan	32 Laporan	100%
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	31 Unit	31 Unit	100%	31 Unit	31 Unit	100%
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	55 Dokumen	33 Dokumen	11 Dokumen	10 Dokumen	90,90%	11 Dokumen	55 Dokumen	100%
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35 Dokumen	21 Dokumen	7 Dokumen	14 Dokumen	200%	7 Dokumen	35 Dokumen	100%
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	280 Orang	168 Orang	56 Orang	55 Orang	98,21%	56 Orang	280 Orang	100%

1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	11 Dokumen	91,66%	12 Dokumen	60 Dokumen	100%
1	5	2	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	45 Kasus	27 Kasus	9 Kasus	17 Kasus	188%	9 Kasus	45 Kasus	100%
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Perbub	100%	100%	100%	111%	111%	100%	100%	100%
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha.	100 Laporan	60 Laporan	20 Laporan	12 Laporan	60%	20 Laporan	100 Laporan	100%
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30 Laporan	18 Laporan	6 Laporan	8 Laporan	133%	6 Laporan	30 Laporan	100%

1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	150 Laporan	90 Laporan	30 Laporan	42 Laporan	140%	30 Laporan	150 Laporan	100%
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas	28 Satlinmas	28 Satlinmas	28 Satlinmas	100%	28 Satlinmas	28 Satlinmas	100%
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	93,14%	91,93%	100%	293%	100%
1	5	3	2.02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	248 Orang	248 Orang	248 Orang	228 Orang	91,93%	248 Orang	248 Orang	100%
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	100%	< 15 Menit	< 15 Menit	100%
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentse penanggulangan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

					dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1	5	4	2.01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait								
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		100%	-	100%	-	-	100%	100%	100%
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	600 Orang		200 Orang					

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung dan mencapai tujuan sasaran daerah Kabupaten Jember ditetapkan beberapa strategi dan kebijakan yang merupakan ketentuan- ketentuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan alat untuk mencapai kinerja pelayanan sesuai tupoksi yang dimandatkan ke Satuan Polisi Pamong Praja. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Perencanaan Pembangunan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember meyenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggraan perlindungan masyarakat, serta pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggraan perlindungan masyarakat, serta pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perbup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengingat tuntutan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja semakin besar dan

kompleks, maka pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan secara profesionalisme dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menambah sarana dan prasarana serta mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia.

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada Tabel TC-25 Renstra OPD 2021-2026. Adapun Tabel Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja pada Tabel 3 dan Tabel TC-25 Renstra pada Tabel 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	a. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum b. Persentase Penegakan Perda	$\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang Tertangani}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang Masuk/Dilaporkan}} \times 100\%$ Penjelasan : • Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan berdasarkan Laporan Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Umum baik melalui laporan secara langsung, melalui WA Center, surat atau media sosial Satpol PP • Patroli regu siaga dan pengamanan ketertiban terjadwal setiap hari terbagi dalam 3 shift yaitu pagi, siang dan malam. Durasi tiap shift adalah 8 jam, sehingga dalam 24/7 ada regu yang bersiaga $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah yang Tertangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang Masuk/Dilaporkan}} \times 100 \%$ Penjelasan : • Penanganan Pelanggaran Perda dilaksanakan berdasarkan Laporan dari Masyarakat baik secara langsung, melalui surat, medsosSatpolPP dan aplikasi web E-SP4N Lapor Serta Laporan dari OPD di Lingkungan Pemkab Jember	Data Pelanggaran Perda	• Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Hukum Daerah; • Bidang Tibum dan Tranmas

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)}}{10.000 \text{ Penduduk}}$ Penjelasan : - Petugas perlindungan masyarakat adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala Desa untuk melaksanakan Linmas. - Standar cakupan satlinmas berdasarkan pada : Permendagri No. 84 Tahun 2014 dan SK Wakil Menteri I Urusan Pertahanan Keamanan No:MI/72/1962	- Data anggota satlinmas - Data Penduduk	Bidang Perlindungan Masyarakat
3	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	$\frac{\text{Jumlah Response Time Kejadian Kebakaran}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}}$ Penjelasan : Response time atau waktu tanggap penanganan kebakaran adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk tiba di lokasi kebakaran dan siap memberikan layanan setelah menerima laporan Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000	Data respon penanganan kebakaran	UPT Pemadam Kebakaran

Tabel Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Tabel Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (TC-25) Renstra OPD 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman		Indeks Rasa AMAN	3,00 (B)	3,15 (B)				
		Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	a. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	100%				
			b. Persentase Penegakan PERDA	100%	100%				
		Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	28 satlinmas/ 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk				
		Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	13,53 menit	<15 menit				

Setelah Perubahan									
	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman		Indeks Rasa AMAN			3,30 (B)	3,45 (B)	3,60 (B)	3,75 (B)
		Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	a. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum			100%	100%	100%	100%
			b. Persentase Penegakan PERDA			100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).			28 Satlinmas/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas/ 10.000 penduduk
		Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).			<15 menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit

Capaian Kinerja Pelayanan Satuab Polisi Pamong Praja ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dengan jenis pelayanan dasar yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Adapun Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Jember didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai SAKIP OPD			A				A				
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Perencanaan Pembangunan											
1	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember

1. *Koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan*

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember terbagi dalam 3 (tiga) unsur yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Pemadam Kebakaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara

keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Berdasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 1 Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Adapun koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tabel 2.1 Koordinasi Dan Sinergi Program Antara Perangkat Daerah Provinsi Dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Dengan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Ketenteraman dan dan ketertiban Umum	a. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda.	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur. Pembinaan PPNS provinsi.	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
2	Kebakaran	a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran.	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

2. Permasalahan dan hambatan

1. Belum dapat memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor : 17 Tahun 2019;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang per Undang-Undangan dan Perda;
3. Kurangnya sarana dan prasarana minimal Satpol PP;
4. Terbatasnya Pagu Anggaran untuk Program/ Kegiatan Langsung yang Menunjang terhadap Peningkatan Capaian Kinerja Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember. Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya;
5. Sumber daya manusia (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tingkat pendidikan dan Umur, karena anggota Linmas merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana Alam;
6. Masih banyak anggota Linmas yang belum mempunyai Sumber daya manusia (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tingkat pendidikan dan Umur, karena anggota Linmas merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana Alam;
7. Sarana dan Prasarana pos kamling yang kurang mendukung dan kurang memadai;
8. Kurangnya posko Pemadam Kebakaran yang mampu menjangkau dan merespon dengan lebih cepat dan tepat, serta jumlah personil dan sarana prasarana yang ada masih sangat terbatas;
9. Tingkat Pemahaman masyarakat untuk mendahulukan mobil DAMKAR dalam melaksanakan tugas saat di jalan raya masih kurang;
10. Kurang sarana dan prasarana terutama mobil pemadam kebakaran karena sudah tidak layak pakai.

2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap SPM

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 adalah : “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember. Berdasarkan

Visi tersebut , dalam mewujudkan visi pembangunan ditetapkan 7 (tujuh) misi yaitu 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah, 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif legislatif masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya, 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah, 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasis kekayaan sumber daya alam sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari, 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi, 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember, 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya. Satuan Polisi Pamong Praja berada pada misi ke-2, seperti yang tercantum pada RPJMD pada misi ini untuk menjamin keberlangsungan atau sustainability usaha dan kehidupan di sekitarnya pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam di wilayah kabupaten Jember harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan memberi akses yang luas bagi pelaku usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Jember. Pada misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan pemerintahan yang stabil tanpa konflik agar terwujud pelayanan publik yang responsif dan cepat. Komunikasi yang efektif dan efisien dibutuhkan agar program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah dapat dipadukan dengan partisipasi masyarakat luas melalui ormas maupun kelompok masyarakat sipil lainnya sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban umum.

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	SPM
(2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	(1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	(1) Terjaganya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan.	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 2. Program Penanggulangan Bencana; 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	1. Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara; 2. Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.

3. *Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, Satpol PP Kabupaten Jember memiliki tantangan dan peluang. Peluang dan tantangan tersebut adalah sebagai berikut ini:

Tantangan :

1. Masih tingginya pelanggaran Perda dan peraturan Bupati
2. Masih tingginya gangguan ketertiban dalam masyarakat antara lain disebabkan oleh pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah
3. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas anggota Satpol PP dan PPNS;
6. Masih kurangnya sarana prasarana
7. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban

8. Jangkauan dari pos terdekat kelokasi kejadian kebakaran relative jauh
9. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kebakaran secara dini
10. Kurangnya sarana prasarana penanganan kebakaran

Peluang :

1. Pemahaman aparaturnya terhadap Tugas dan Fungsi
2. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember setiap tahun
3. Adanya struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat
4. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat
5. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat
6. Kesadaran dan tanggung jawab aparaturnya Satpol PP untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan
7. Adanya aparat pemadam kebakaran yang disiplin, terlatih dan bertanggung jawab terhadap tugas untuk melayani masyarakat (Pantang pulang sebelum padam)

4. ***Rekomendasi dan catatan***

Formulasi isu-isu penting berupa **rekomendasi dan catatan** yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan sebagai Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan, adapun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi :

1. Penguatan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan melalui pendekatan humanitas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah.

2. Optimalisasi tugas dan fungsi Satlinmas pada target RT/RW/Desa /Kelurahan.
3. Optimalisasi Pos Damkar melalui pengembangan/ pembangunan pos baru yang didukung dengan sarpras yang memadai

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan operasional patroli secara rutin dan terjadwal
2. Optimalisasi pemberdayaan terhadap tugas pokok dan fungsi Satlinmas melalui sosialisasi dan arahan secara rutin
3. Pengembangan kecukupan damkar dan kompetensi anggota damkar melalui sertifikasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Program, Kegiatan dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praj Kabupaten Jember yang tertuang dalam Renja 2026 harus selaras dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan perencanaan dengan berbagai pertimbangan diantaranya SDM, anggaran, kebutuhan masyarakat dan faktor lain yang terkait didasarkan pada skala prioritas sehingga diharapkan perencanaan yang disusun mampu menjawab kebutuhan.

Hasil analisis kebutuhan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pertimbangan dari berbagai masukan terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dari sisi anggaran, lokasi sasaran, target indicator keluaran dan hasil, maka sesuai kondisi pada tahun berjalan dan proyeksi tahun yang akan datang terdapat penyesuaian kegiatan. Perbandingan data antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisa kebutuhan secara lengkap pada tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Jember dengan hasil analisis sebagai berikut :

Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	SESUAI KEPMEN 90011513-17	RENSTRA	14.654.958.556	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember			14.654.958.556	
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	5.860.192	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	5.860.192	
1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000	

1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Jember	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.042.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Jember	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.042.000	
1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Jember	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.091.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Jember	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.091.000	
1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jember	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.428.992	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jember	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.428.992	
1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.298.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.298.200	

1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah laporan pertanggung jawaban Keuangan	16 Laporan	12.036.576.702	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah laporan pertanggung jawaban Keuangan	16 Laporan	12.036.576.702	
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jember	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan	13.542.505.918	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jember	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan	13.542.505.918	
1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Jember	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	307.649.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Jember	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	307.649.000	
1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jember	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2.680.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jember	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2.680.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	15 Laporan	2.210.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	15 Laporan	2.210.000	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jember	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.210.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jember	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.210.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jember	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jember	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3 Dokumen		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3 Dokumen		
1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jember	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jember	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	38 Laporan	195.538.436	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jember	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	38 Laporan	195.538.436	
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jember	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.920.853	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jember	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.920.853	

1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jember	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jember	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jember	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.641.024	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jember	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.641.024	
1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jember	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.874.084	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jember	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.874.084	
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jember	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.512.475	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jember	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.512.475	
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jember	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	108.910.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jember	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	108.910.000	
1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Jember	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.680.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Jember	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.680.000	

1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jember	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37 Laporan	2.023.456.620	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jember	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37 Laporan	2.023.456.620	
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jember	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.848.620	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jember	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.848.620	
1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jember	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jember	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jember	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.994.608.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jember	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.994.608.000	

1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jember	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Laporan	391.316.606	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jember	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Laporan	391.316.606	
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jember	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.758.840	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jember	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.758.840	
1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jember	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	350.557.766	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jember	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	350.557.766	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Jember	Tingkat Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang terselesaikan	100%	9.255.890.160	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Jember	Tingkat Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang terselesaikan	100%	9.255.890.160	

2.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jember	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	1.587.037.160	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jember	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	1.587.037.160	
2.2.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Jember	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	11 Dokumen	195.232.960	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Jember	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	11 Dokumen	195.232.960	
2.2.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jember	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	1.000.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jember	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	1.000.000.000	

2.2.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Jember	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	56 Orang	135.964.200	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Jember	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	56 Orang	135.964.200	
2.2.01.6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jember	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	12.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jember	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	12.000.000	
2.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Jember	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9 Kasus	243.840.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Jember	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9 Kasus	243.840.000	

2.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Jember	Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Perbub	100%	7.668.853.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Jember	Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Perbub	100%	7.668.853.000	
2.2.02.10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Jember	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	5.529.835.200	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Jember	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	5.529.835.200	
2.2.02.11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Jember	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	30 Laporan	2.067.550.900	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Jember	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30 Laporan	2.067.550.900	

2.2.02.12	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Jember	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 Laporan	71.466.900	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Jember	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	71.466.900	
4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Jember	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	<15 Menit	3.626.804.600	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab. Jember	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	<15 Menit	3.626.804.600	
4.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jember	Presentse penanggulangan kebakaran	100%	3.626.804.600	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jember	Presentse penanggulangan kebakaran	100%	3.626.804.600	

4.2.01.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jember	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	2.535.134.600	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jember	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	2.535.134.600	
4.2.01.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Jember	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Paket	1.008.090.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Jember	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Paket	1.008.090.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan oleh pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Kewilayahan atau Kecamatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat di forum musrenbang ini tidak terdapat usulan kegiatan baru yang diusulkan oleh masyarakat

Berdasarkan uraian diatas, usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah :

Tabel T-C. 3.2. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
			NIHIL			

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Visi bernegara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi tersebut didukung oleh empat misi bernegara yang merupakan tujuan bangsa. Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun Visi Indonesia Emas yang tertuang pada RPJPN 2025-2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi; dan
3. Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu:
 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan
 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu:
 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta
 8. Kestinambungan Pembangunan.

Terkait dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat mengarah pada misi ke-4 yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia dengan arah kebijakan poin pertama yaitu terwujudnya supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM.

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Hal tersebut dilaksanakan utamanya melalui arah kebijakan pada poin ke-2 yaitu penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif. Adapun Keselarasan Tema Pembangunan RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2026 pada table 3.1 dan Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember Tahun 2026 pada table 3.2.

Tabel 3.1 Keselarasan Tema Pembangunan RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2026.

RKP	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR	RKPD KABUPATEN JEMBER
Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan	Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Pondasi Transformasi Sosial Ekonomi yang Berkelanjutan

Tabel 3.2 Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember Tahun 2026

NO	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN JEMBER
1	Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;	Penurunan kemiskinan menuju masyarakat yang berkeadilan
2	Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;	Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Produktif dan peningkatan investasi
3	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;	Peningkatan pelayanan dasar yang merata di sektor pendidikan dan kesehatan
4	Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan;	Peningkatan kualitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan
5	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;	Peningkatan kualitas SDM yang berideologi Pancasila, religius dan berdaya saing
6	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;	Peningkatan ketahanan pangan melalui optimalisasi potensi unggulan daerah dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
7	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;	Pembangunan ekonomi kerakyatan di wilayah pedesaan berbasis koperasi, usaha mikro dan BUMdesa
8	Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi;	Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang efisien berbasis IPTEK

9	Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.	Peningkatan daya tarik wisata dan pelestarian kebudayaan serta lingkungan hidup yang berkelanjutan
---	--	--

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, yaitu:

Tujuan Non Rutin:

Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

Sasaran Non Rutin:

1. Meningkatkan rasa aman / tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas.
2. Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat.
3. Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran.

Tujuan Rutin:

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas

Sasaran Rutin:

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- **Visi - Misi**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke-2 Tujuan ke-1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember berperan untuk menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan.

- **SPM**

Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman

dan Ketertiban Pelindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang mendukung Program yang tercantum pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Jember. Program tersebut diantaranya:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain:

1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2026 mengacu pada capaian indikator sasaran program yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 sebagaimana termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026 terdapat 4 program 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja pada Tahun 2026.

2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lokasi program/kegiatan/sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lokasi program/kegiatan/sub kegiatan pada Kabupaten ember
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lokasi program/kegiatan/sub kegiatan pada Kabupaten Jember

3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana tercantum pada Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2026 akan melaksanakan 3 program yang terdiri dari 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan nilai total anggaran Belanja sebesar Rp. 27.215.832.596

Tabel T-C. 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase indikator program yang tercapai	Kabupaten Jember	90%	18.781.076.798	DAU	-	90%	25.070.555.257
						Persentase Realisasi Anggaran		90%				90%	
						Indeks Profesional ASN		74,91				76,01	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Jember	11	939.100	DAU	-	11	7.993.192
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kabupaten Jember	1	939.100	DAU	-	1	1.000.000
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Jember	1	-	DAU	-	1	1.042.000

1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Jember	1	-	DAU	-	1	1.091.000
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Jember	1	-	DAU	-	1	1.042.000
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Jember	1	-	DAU	-	1	1.091.000
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Jember	3	-	DAU	-	3	1.428.992
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Jember	3	-	DAU	-	3	1.298.200
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Kabupaten Jember	4	18.437.051.357	DAU	-	4	20.286.766.643
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Jember	123	18.160.397.857	DAU	-	123	19.976.437.643
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Jember	1	275.580.000	DAU	-	1	307.649.000
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Jember	1	1.073.500	DAU	-	1	2.680.000

1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Jember	6	0	DAU	-	6	3.508.200
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Jember	4	-	DAU	-	4	2.210.000
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Jember	1	-	DAU	-	1	1.298.200
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Kabupaten Jember	3	144.119.300	DAU	-	3	252.210.000
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Jember	1	144.119.300	DAU	-	1	250.000.000
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Jember	2	-	DAU	-	2	2.210.000
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Kabupaten Jember	41	185.710.500	DAU	-	41	345.538.436
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Jember	4	1.039.500	DAU	-	4	3.920.853
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Jember	4	2.794.000	DAU	-	4	150.000.000
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kabupaten Jember	4	1.998.600	DAU	-	4	1.641.024
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Jember	12	28.358.800	DAU	-	12	60.874.084

1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Jember	4	11.360.600	DAU	-	4	12.512.475
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Jember	12	140.159.000	DAU	-	12	108.910.000
1	5	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Jember	1	-	DAU	-	1	7.680.000
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Jember	5	-	DAU	-	5	50.000.000
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Jember	5	-	DAU	-	5	50.000.000
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Jember	49	51.098.700	DAU	-	49	3.733.222.180
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Jember	12	-	DAU		12	2.500.000
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Jember	12	51.098.700	DAU		12	8.848.620
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Jember	12	9.000.000	DAU		12	20.000.000
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Jember	13	3.703.439.560	DAU		13	3.701.873.560

1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Jember	6	147.868.340,96	DAU	-	6	391.316.606
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Jember	1	11.931.140	DAU	-	1	40.758.840
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Jember	31	135.937.201	DAU	-	31	350.557.766
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kabupaten Jember		8.318.133.387				4.608.800.000
					1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda		100		DAU		100	
					2. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	2. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		100		DAU		100	
					3. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	3. Persentase Cakupan Pelindungan Masyarakat		100		DAU		100	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Kabupaten Jember	68	601.842.397	DAU	-	68	2.713.800.000

1	05	02	2.01	000 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Jember	12	333.456.397	DAU	-	12	1.658.300.000
1	05	02	2.01	000 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Jember	6	105.117.500	DAU	-	6	80.000.000
1	05	02	2.01	000 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Jember	60	52.332.500	DAU	-	60	100.000.000
1	05	02	2.01	000 6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kabupaten Jember	12	5.760.000	DAU	-	12	12.000.000
1	05	02	2.01	000 8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kabupaten Jember	4	-	DAU	-	4	1.000.000

1	05	02	2.01	001 0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Kabupate n Jember	45	-	DAU	-	45	85.000.000
1	05	02	2.01	001 3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupate n Jember	300	-	DAU	-	300	400.000.000
1	05	02	2.01	001 4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDM nya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kabupate n Jember	100	-	DAU	-	100	100.000.000
1	05	02	2.01	001 5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kabupate n Jember	75	105.176.000	DAU	-	75	250.000.000
1	05	02	2.01	001 7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kabupate n Jember	1	-	DAU	-	1	10.000.000
1	05	02	2.01	001 8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kabupate n Jember	97	-	DAU	-	97	17.500.000

					Ketentraman dan Ketertiban Umum								
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penanganan pelanggaran perda	Kabupaten Jember	40	7.716.290.990	DAU DBHCH T	-	40	1.825.000.000
1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Jember	12	-	DAU	-	12	100.000.000
1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Jember	3	-	DAU	-	3	25.000.000
1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Kabupaten Jember	5	-	DAU	-	5	100.000.000
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Jember	12	4.208.694.580	DAU DBHCH T	-	12	600.000.000
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kabupaten Jember	12	3.495.094.570	DBHCH T	-	12	900.000.000

1	05	02	2.02	001 2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Jember	12	12.501.840	DAU	-	12	100.000.000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS Penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP	Kabupaten Jember	1	-	DAU	-	1	70.000.000
1	05	02	2.03	000 2	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Kabupaten Jember	1	-	DAU		1	25.000.000
1	05	02	2.03	000 4	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kabupaten Jember	1	-	DAU		1	45.000.000
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Kabupaten Jember		116.622.411	DAU	-		2.344.000.000
					1. Meningkatkan layanan pencegahan kebakaran	1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran		100			-	100	
					2. Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		60,2			-	60,2	
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terlayani	Kabupaten Jember	650	116.622.411	DAU	-	650	2.204.000.000

					dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kabupaten Jember	10	-	DAU	-	10	45.000.000
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Jember	12	116.622.411	DAU	-	12	300.000.000
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kabupaten Jember	35	-	DAU	-	35	65.000.000
1	5	4	2.01	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Jember	10	-	DAU	-	10	30.000.000
1	5	4	2.01	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah, dan Legal	Kabupaten Jember	1	-	DAU	-	1	150.000.000

1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kabupaten Jember	4	-	DAU	-	4	40.000.000
1	5	4	2.01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kabupaten Jember	45	-	DAU	-	45	1.574.000.000
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	Kabupaten Jember	100%	-	DAU		1	140.000.000
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kabupaten Jember	100	-	DAU	-	100	70.000.000
1	5	4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kabupaten Jember	30	-	DAU	-	30	70.000.000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.537.653.316	APBD Kabupaten & DBHCHT
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				27.537.653.316	APBD Kabupaten & DBHCHT
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase realisasi anggaran yang tercapai		100%	14.654.958.556	APBD Kabupaten
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Dokumen	5.860.192	APBD Kabupaten
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jember	1 Dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Jember	2 Dokumen	1.042.000	APBD Kabupaten

1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Jember	2 Dokumen	1.091.000	APBD Kabupaten
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jember	3 Laporan	1.428.992	APBD Kabupaten
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jember	3 Laporan	1.298.200	APBD Kabupaten
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban Keuangan		16 Laporan	12.036.576.702	APBD Kabupaten
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jember	124 Orang/Bulan	13.542.505.918	APBD Kabupaten
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Jember	1 Dokumen	307.649.000	APBD Kabupaten
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jember	1 Dokumen	2.680.000	APBD Kabupaten
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		15 Laporan	2.210.000	APBD Kabupaten

					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jember	12 Laporan	2.210.000	APBD Kabupaten
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jember	3 Laporan		APBD Kabupaten
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Kab. Jember	3 Dokumen		APBD Kabupaten
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jember	1 Paket		APBD Kabupaten
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		38 Laporan	195.538.436	APBD Kabupaten
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Jember	4 Paket	3.920.853	APBD Kabupaten
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jember	1 Paket		APBD Kabupaten
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Jember	4 Paket	1.641.024	APBD Kabupaten
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jember	12 Paket	60.874.084	APBD Kabupaten
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jember	4 Paket	12.512.475	APBD Kabupaten
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jember	12 Laporan	108.910.000	APBD Kabupaten

1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Jember	1 Dokumen	7.680.000	APBD Kabupaten
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		37 Laporan	2.023.456.620	APBD Kabupaten
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jember	12 Laporan	8.848.620	APBD Kabupaten
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jember	12 Laporan	20.000.000	APBD Kabupaten
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jember	13 Laporan	1.994.608.000	APBD Kabupaten
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		32 Laporan	391.316.606	APBD Kabupaten
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Jember	1 Unit	40.758.840	APBD Kabupaten
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Jember	31 Unit	350.557.766	APBD Kabupaten

1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang terselesaikan		100%	9.255.890.160	APBD Kabupaten
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	1.587.037.160	APBD Kabupaten
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Jember	11 Dokumen	195.232.960	APBD Kabupaten
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jember	7 Dokumen	1.000.000.000	APBD Kabupaten
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Jember	56 Orang	135.964.200	APBD Kabupaten
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Jember	12 Dokumen	12.000.000	APBD Kabupaten

1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Jember	9 Kasus	243.840.000	APBD Kabupaten
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Perbub		100%	7.668.853.000	APBD Kabupaten
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Jember	20 Laporan	5.529.835.200	DBHCHT
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kab. Jember	30 Laporan	2.067.550.900	APBD Kabupaten
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Jember	6 Laporan	71.466.900	DBHCHT
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		<15 Menit	3.626.804.600	APBD Kabupaten

1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentse penanggulangan kebakaran		100%	3.626.804.600	APBD Kabupaten
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jember	12 Laporan	2.535.134.600	APBD Kabupaten
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Jember	1 Paket	1.008.090.000	APBD Kabupaten

BAB V PENUTUP

Dengan dilaksanakannya Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2025, yang nantinya pada Penetapan Rencana Kerja akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RKA Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Jember Tahun 2025. Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2025 disusun berdasarkan RPJM Kabupaten Jember periode Tahun 2021-2025, dan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Keberadaan Renja SKPD tersebut nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Dokumen Perencanaan lainnya serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Kemudian didalam Rencana Kerja SKPD dimuat indikator kinerja yang terukur untuk jangka waktu satu (1) tahun yang diharapkan akan lebih memperjelas program kerja tahunan Pemerintah Daerah, termasuk sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.

Untuk mengetahui seberapa besar hasil capaian kinerja suatu unit kerja, diperlukan adanya evaluasi dengan membandingkan antara rencana pencapaian kinerja dengan realisasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian Renja SKPD dapat dijadikan tolak ukur evaluasi dan laporan pelaksanaan atau kinerja tahunan dan lima tahunan. Beberapa hal yang menjadi catatan penting antara lain:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Satpol PP mutlak untuk dilakukan karena semakin kompleksnya persoalan dan permasalahan ketentraman dan ketertiban di masyarakat, baik dengan melaksanakan pendidikan formal maupun informal (diklat, bintek dan sebagainya). Apalagi keberadaan tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terbatas seringkali kurang maksimal dalam mengimbangi banyaknya kasus pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Kuantitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan anggota di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember sebanyak 215 anggota yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 103 orang dan Non PNS 112 personil.

Padahal kondisi dilapangan untuk optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsinya setidaknya harus ada 250 personil di OPD Satuan Polisi PP yang bertugas di bagian administrasi, pasukan siaga maupun piket aset Pemkab.

3. Terbatasnya anggaran yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember

Apabila dilihat dari tahun ke tahun, jumlah anggaran Belanja Langsung (program dan kegiatan) yang dikelola Satpol PP masih sangat jauh dari ideal, hal ini seringkali menjadi masalah teknis dilapangan dalam merealisasikan program dan kegiatan yang sesuai dengan Tupoksi Satpol PP.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang

Melihat besarnya Kabupaten Jember dan tingginya jumlah penduduk, maka mobilitas Satpol PP sangat diperlukan, hal ini selain membutuhkan tambahan personil juga dituntut untuk melengkapi diri dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam menjalankan tugas-tugas dilapangan akan sangat membantu. Keberadaan mobil anti huru hara, perlengkapan dalmas, peralatan pembongkaran dan kelengkapan lainnya menjadi sangat penting untuk mendampingi setiap pelaksanaan program dan kegiatan.

5. Satuan Polisi Pamong Praja bertambah tupoksi dengan kehadiran UPT. DAMKAR

Sejak tahun 2017 organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember semakin berkembang dengan bertambahnya tupoksi dari UPT. DAMKAR, sehingga penguatan pengorganisasian, sumber daya manusia serta pendanaan dibutuhkan untuk menguatkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun rencana tindak lanjut pada tahun-tahun mendatang yang diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember dititik beratkan pada:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember
2. Peningkatan Kualitas/Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember
3. Peningkatan Pagu Anggaran untuk Program/ Kegiatan Langsung yang Menunjang terhadap Peningkatan Capaian Kinerja Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan Kepada Daerah perlu dicukupi dan dipastikan senantiasa dalam keadaan baik.

5. Pengaturan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang bisa menjangkau hingga ke Kecamatan baik secara anggaran, struktural maupun fungsional.
6. Penyiapan pos titik Pemadam Kebakaran (DAMKAR) yang bertambah dari 4 (empat) titik menjadi 7 (tujuh) titik, membutuhkan penguatan di bidang sumberdaya manusia, sarana prasarana dan anggaran operasional.

Dalam penyusunan Renja ini perlu disusun beberapa kaidah-kaidah yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan yang meliputi :

1. Merencanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJMD dan Renstra yang telah disusun
2. Dapat menjadi input bagi penyusunan Rencana Kerja periode berikutnya sekaligus sebagai bahan evaluasi penyusunan rencana strategis menuju cita-cita umum pengelolaan pemerintahan secara efektif, efisien dan ekonomis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jember.

Jember, Maret 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Bambang Saputro, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197407131993111003